

DINAS PERHUBUNGAN KOTA BLITAR

LKjLP

TAHUN 2022



DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Kenari No. 110 Telp. (0342) 801989 Fax. (0342) 815441

Situs web : <http://dishub.blitarkota.go.id> E-mail : dishub@blitarkota.go.id

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh...



Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat karunia-Nya, sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2021 dengan baik. LKjIP ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Blitar. Berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka penyusunan LKjIP Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2022 ini merupakan laporan rutin yang disusun setiap tahun sekali, dimaksudkan untuk mengukur capaian kinerja yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Disamping itu LKjIP Dinas Perhubungan Kota Blitar disusun untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai serta aspek keuangan yang secara langsung meningkatkan hubungan antara anggaran yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh. Ada banyak hal yang dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dalam konteks pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Blitar, akan tetapi masih banyak juga permasalahan dan tantangan yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan-kebijakan strategis dalam mengawal perkembangan dan dinamika di bidang perhubungan secara konsisten dan berkesinambungan sesuai dengan Tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan serta Visi dan Misi Kota Blitar.

Dengan dibuatnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 Dinas

Perhubungan Kota Blitar ini, agar dapat bermanfaat untuk bahan referensi pengambilan kebijakan/keputusan dalam menetapkan program dan kegiatan disektor transportasi yang lebih terarah, efektif, berdaya guna dan berhasil guna pada tahun-tahun mendatang. Kami mengharap saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan dan kebaikan kinerja Dinas Perhubungan.

Wassalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh...

Blitar, 25 Februari 2023
Kepala Dinas Perhubungan
Kota Blitar

JUARI, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196512041 98603 1 006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kota Blitar tahun 2022 merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban suatu instansi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya selama kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan. Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretris Daerah. Sedangkan Dinas Perhubungan menjalankan beberapa fungsi diantaranya yaitu perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan pengkoordinasian serta pelayanan umum di bidang perhubungan.

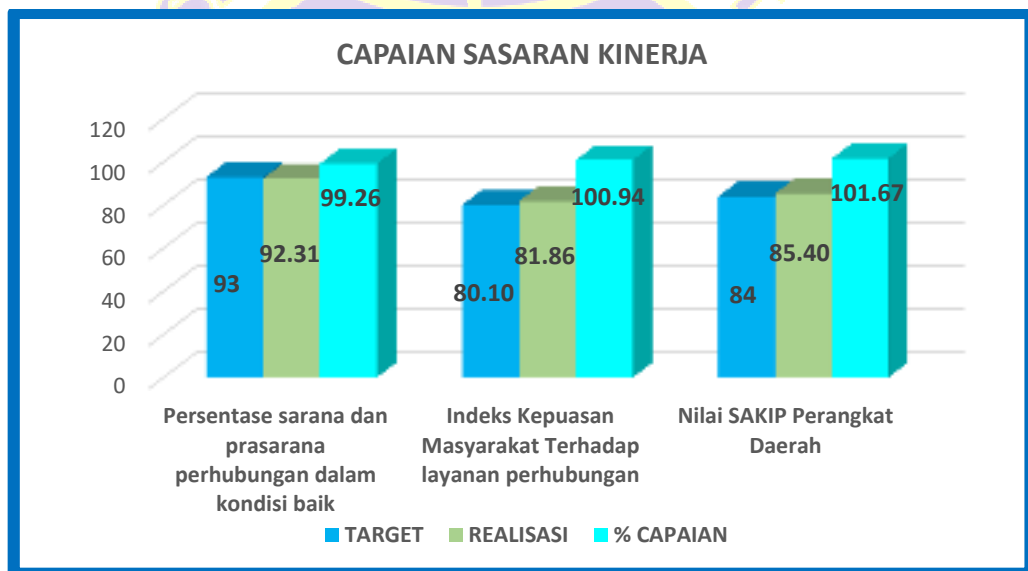
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026 dalam membangun Kota Blitar 5 (lima) tahun yang akan datang terdapat visi dan beberapa misi Daerah yang diemban dengan sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Adapun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD 2016-2021 yang mengakomodir urusan perhubungan adalah sebagai berikut :

VISI : “Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT”
MISI IV : Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan
TUJUAN : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah
SASARAN : Meningkatnya Kualitas Perhubungan

Dari Tujuan dan Sasaran RPJMD diatas, maka dapat ditentukan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kota Blitar tahun 2021-2026 yaitu sebagai berikut :

TUJUAN RENSTRA 2021-2026 : 1. Meningkatkan Kualitas Perhubungan 2. Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah
SASARAN RENSTRA 2021-2026 : 1. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perhubungan 2. Meningkatnya Kualitas Layanan Perhubungan 3. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah

Adapun pencapaian Kinerja Sasaran dapat ditunjukkan pada table berikut:



Dalam pencapaian kinerja tahun 2022 Dinas Perhubungan Kota Blitar ada satu indikator yang tidak tercapai yaitu persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik, hal ini disebabkan karena adanya refocusing anggaran yang berdampak pada penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana perhubungan. Sehingga ada beberapa ruas jalan yang tidak dilengkapi sarpras perhubungan maupun fasilitas keselamatan jalan. Untuk menyikapi hal tersebut, maka untuk tahun 2023 direncanakan untuk melakukan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana perhubungan dan fasilitas

keselamatan, yang didukung dengan adanya beberapa kegiatan manajemen rekayasa lalu lintas, pengendalian dan operasional di lapangan, penataan parkir tepi jalan umum serta pengelolaan angkutan umum dan terminal agar tercipta kondisi yang aman, tertib dan lancar di Kota Blitar.

Setelah ditetapkan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perhubungan, maka disusunlah Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah. Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2022 berikut target dan realisasi kinerja serta anggarannya dapat dilihat pada tabel dibawah :

Sasaran Kinerja	Indikator Sasaran	Target		Realisasi		% Capaian		Efisiensi
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	93	17.417.317.912,00	92,31	16.678.104.880,48	99,26	95,76	1,04
Meningkatnya kualitas layanan perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan perhubungan	81,10	4.081.020.717,00	81,86	3.898.079.061,74	100,94	95,52	1,06
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84	7.939.328.435,00	85,40	7.598.164.356,71	101,67	95,70	1,06

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa untuk sasaran 1, *Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan* dikatakan efisien, karena untuk mencapai kinerja sebesar 99,26% dibutuhkan anggaran sebesar 95,76%. Dan untuk sasaran 2, *Meningkatnya kualitas layanan perhubungan* dikatakan efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 100,94% membutuhkan anggaran sebesar 95,52%. Sedangkan untuk sasaran 3, *Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah* juga dikatakan efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 101,67% dibutuhkan anggaran sebesar 95,70%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI.....	6
BAB I PENDAHULUAN	8
A. Latar Belakang	8
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	8
C. Maksud dan Tujuan	13
D. Dasar Hukum	13
E. Aspek – Aspek Strategis	15
F. Isu – Isu Strategis	16
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	18
A. Rencana Strategis	18
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	23
A. Pengukuran Capaian Kinerja / Sasaran	23
1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2022.	24
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 – 2022.....	29
3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra	31
4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional (Target SPM) ...	31
B. Akuntabilitas Keuangan	34

1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan	38
2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran	39
3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	41
C. Prestasi / Penghargaan	43
BAB IV PENUTUP	45
A. Kesimpulan.....	45
B. Langkah Perbaikan	46
Lampiran-lampiran	
A. Matrik Rencana Strategi OPD Tahun 2021-2026	
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022	
C. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022	
D. Pengukuran Kinerja Tahun 2022	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD). Dalam penyusunan pelaporan kinerja, secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kota Blitar disusun dengan menyajikan informasi kinerja yang terukur atas pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat daerah, realisasi pencapaian indikator tujuan dan sasaran yang disertai dengan beberapa penjelasan atas pencapaian tersebut. Sedangkan pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi Kota Blitar sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

I. Kedudukan

Mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

Perhubungan, Maka Dinas Perhubungan mempunyai kedudukan:

- 1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah;
- 2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

II. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Blitar Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Peraturan Walikota blitar Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar, maka Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Perhubungan Kota Blitar menjalankan fungsi sebagai berikut:

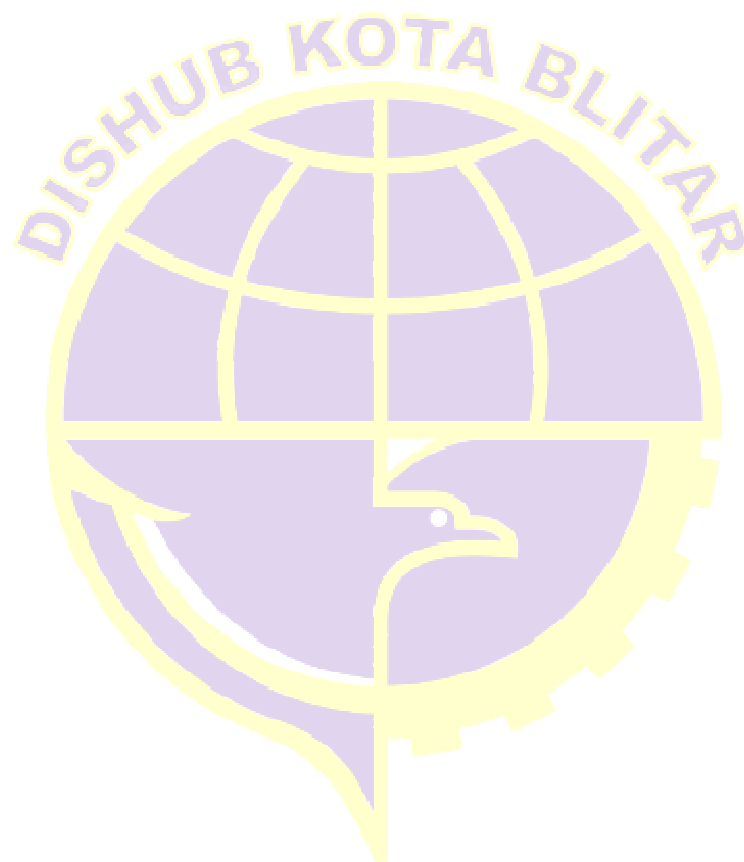
1. Perumusan kebijakan di bidang perhubungan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
3. Pengkoordinasian dan pelayanan umum di bidang perhubungan;
4. Pelaksanaan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD);
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
6. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perhubungan;

7. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
8. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan, dan sarana prasarana kerja;
9. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di dalam lingkungan kantor;
10. Penyusunan pelaksanaan Standart Pelayanan Publik (SPP) dan Standart Operasional Prosedur (SOP);
11. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan IKM;
12. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
13. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang perhubungan secara berkala melalui *sub dominan website* Pemerintah Daerah dan;
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsi.

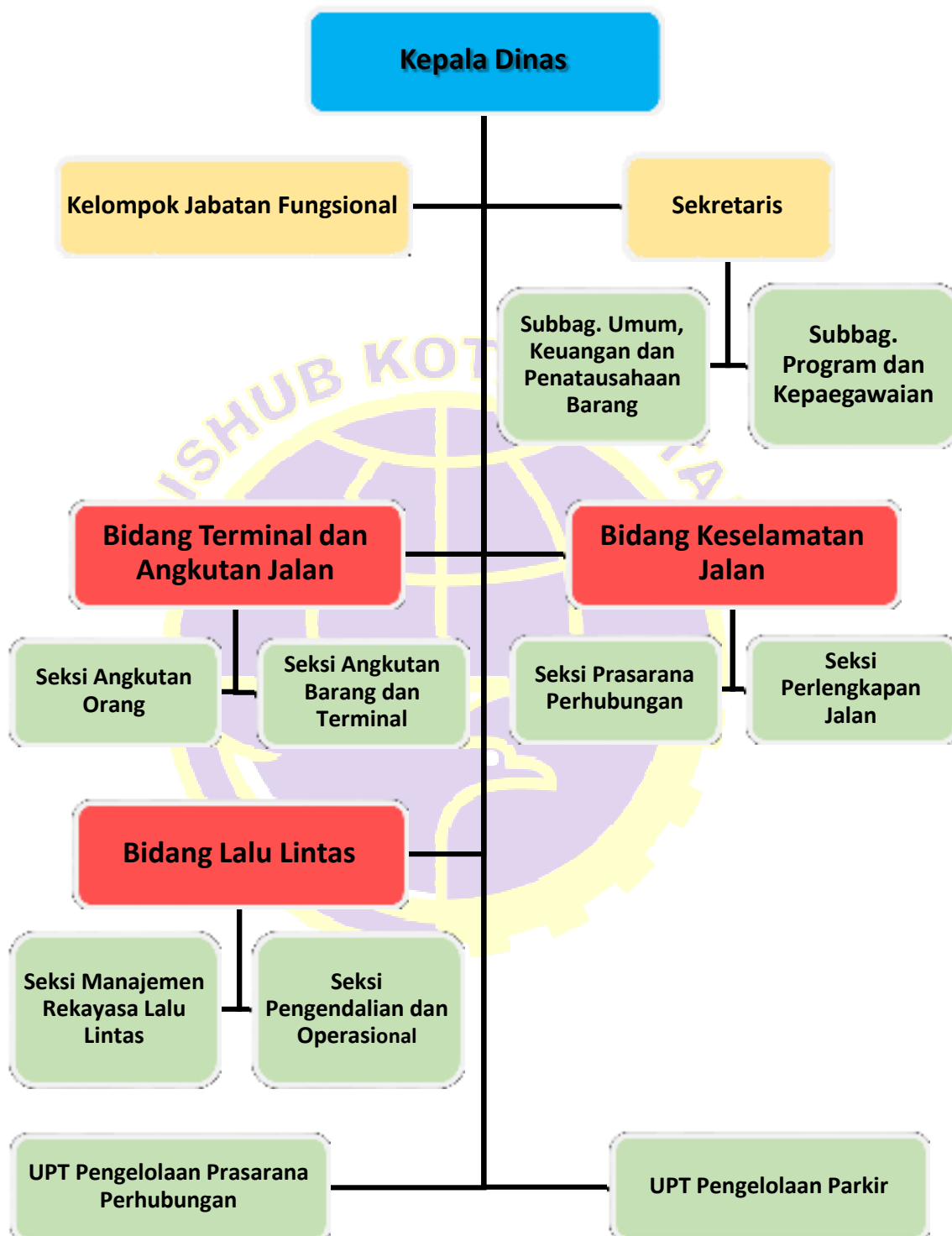
Untuk melaksanakan fungsi tersebut, Dinas Perhubungan Kota Blitar mempunyai kewenangan:

- a. Penetapan kebijakan operasional di bidang Perhubungan;
- b. Penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran perumusan kebijakan teknis, penyusunan program, pengendalian, pembinaan dan pengawasan di bidang Perhubungan;
- c. Perencanaan operasional program Perhubungan;
- d. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional Perhubungan, di tingkat kota;

- e. Pengkajian pemberian izin serta pencabutan izin bidang Perhubungan;
- f. Peremajaan data dalam bidang Perhubungan untuk tingkat kota;
- g. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana bidang perhubungan.



STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN



C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Perhubungan Kota Blitar pada tahun 2022, dengan tujuan:

1. Sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja oleh pemerintah daerah maupun masyarakat;
2. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
3. Memberikan informasi guna penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
4. Sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan datang;
5. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;
6. Sebagai media dalam upaya menyempurnakan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju pemerintahan yang bersih (clean government), dan untuk memenuhi tiga pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

D. Dasar Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kota Blitar tahun 2022 berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang RPJPD Kota Blitar Tahun 2005 - 2025;
13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;
14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor

- 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2022;
 17. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
 18. Peraturan Walikota Blitar Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar;
 19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 20. Peraturan Walikota Blitar Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2022;
 21. Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026;
 22. Peraturan Walikota Blitar Nomor 73 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;
 23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 94 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2022;
 24. Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022 – 2026.

E. Aspek – Aspek Strategis

Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk Kota Blitar yang senantiasa membutuhkan peningkatan pelayanan khususnya di bidang transportasi, maka hal ini merupakan suatu tantangan dan sekaligus suatu peluang dalam pengembangan pelayanan transportasi yang lebih baik bagi Dinas Perhubungan Kota Blitar maupun bagi stakeholder lainnya. Aspek strategis pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kota Blitar yaitu pengembangan prasarana perhubungan, seperti menerapkan PJU LED yang ramah lingkungan dan hemat energi, penerapan

manajemen rekayasa lalu lintas, pengelolaan terminal tipe C dan peningkatan layanan uji kendaraan berkala. Selain itu juga perlunya dilakukan pembinaan kinerja juru parkir tepi jalan umum serta sosialisasi edukasi akan pentingnya tertib berlalu lintas disetiap lapisan masyarakat guna terciptanya lalu lintas yang aman tertib dan lancar.

Strategi lain yang diusung Dinas Perhubungan Kota Blitar yaitu penerapan Smart Card pada proses pengujian kendaraan bermotor dan system pembayaran non tunai. Penerapan dengan menggunakan sistem Smart Card ini diharapkan mampu menarik kesadaran pemilik kendaraan wajib uji karena kemudahan, kemurahan dan transparansi hasil uji yang diberikan oleh Tim Teknis Penguji Kendaraan Bermotor serta menjamin transparansi pemungutan retribusi/ biaya uji yang ada di Dinas Perhubungan Kota Blitar. Selain Smart Card, Dinas Perhubungan juga menerapkan pengguna Aplikasi SIDABUS. Dimana aplikasi ini diperuntukan bagi pengguna jasa layanan angkutan sekolah gratis yang memberikan kemudahan, kenyamanan bagi pengguna layanan serta diperolehnya data pengguna angkutan sekolah yang akurat.

F. Isu – Isu Strategis

Transportasi merupakan salah satu kebutuhan dan kepentingan dari berbagai kegiatan pembangunan dalam upaya menunjang pemenuhan kebutuhan masyarakat. Transportasi dalam peranannya sebagai penunjang dan penggerak serta pemerata hasil-hasil pembangunan mutlak harus direncanakan, diatur dan dikendalikan sedemikian rupa agar dapat berfungsi optimal, oleh sebab itu perencanaan transportasi di suatu daerah harus dilaksanakan secara komprehensif serta mengacu kepada kebutuhan dan kondisi daerah yang bersangkutan.

Melihat kondisi diatas maka ditetapkan isu-isu strategis Dinas Perhubungan Kota Blitar sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pengelolaan Terminal Tipe C dan layanan angkutan umum, sehingga perlu adanya kajian terhadap standarisasi pengelolaan terminal type C agar kedepan mampu menarik minat pengguna jasa angkutan dan mampu bersaing dengan angkutan online yang semakin menjamur.
2. Belum optimalnya pelayanan lalu lintas jalan khususnya dalam penyediaan sarana dan prasarana perhubungan serta fasilitas keselamatan, sehingga perlunya peningkatan ketersediaan dan kualitas prasarana perhubungan;
3. Rendahnya kesadaran pengguna jalan dalam disiplin berlalu lintas, sehingga untuk menyikapi hal tersebut, maka kedepan Dinas Perhubungan akan berupaya mengadakan sosialisasi tentang kesadaran berlalu lintas kepada semua golongan pengguna jalan baik masyarakat umum maupun anak sekolah, agar tingkat pelanggaran lalu lintas di Kota Blitar dapat di minimalisasi;
4. Kurangnya kesadaran pemilik kendaraan wajib uji untuk melakukan uji kendaraan secara berkala. Sehingga dengan adanya penerapan uji kendaraan berbasis Smart Card ini diharapkan mampu menarik kesadaran pemilik kendaraan wajib uji untuk melakukan uji kendaraan secara berkala;
5. Kurangnya kesadaran masyarakat dan rendahnya tingkat disiplin juru parkir dalam melakukan prosedur parkir di tepi jalan. Sehingga sangat perlu sekali kedepan untuk diadakan sosialisasi terhadap pengguna parkir di tepi jalan serta pembinaan terhadap juru parkir secara periodik;

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode lima tahun ke depan. Fungsi Renstra PD adalah sebagai acuan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam pembangunan daerah. Renstra PD, memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan berpedoman pada Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang bersifat indikatif dalam kurung waktu 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Blitar Periode Tahun 2021-2026 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan identifikasi permasalahan, telaah visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaah Renstra Kementerian K/L, Renstra Provinsi Jawa Timur dan hasil evaluasi renstra periode lima tahun sebelumnya, dan telaah RTRW.

Tugas Pokok dan fungsi dari Dinas Perhubungan Kota Blitar adalah Melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Blitar mempunyai keterkaitan dengan misi empat yaitu **“Mewujudkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan”**.

Berdasarkan misi Kepala Daerah tersebut, maka ditetapkanlah satu tujuan dengan tiga sasaran. Dan Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dapat dicapai dengan mengembangkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal. Strategi pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktifitas

rencana kinerja Dinas Perhubungan Kota Blitar, masing-masing dikembangkan kedalam tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan. Adapun strategi dimaksud dapat dirumuskan sebagaimana tercantum dalam tabel II.1 berikut:

Tabel II.1
Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Perhubungan Kota Blitar

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatnya Kualitas Perhubungan	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Peningkatan ketersediaan dan kualitas prasarana perhubungan	Optimalisasi pemeliharaan dan rehabilitasi terminal
			Peningkatan ketersediaan fasilitas terminal memadai
		Peningkatan ketersediaan perlengkapan dan keselamatan jalan yang memadai	Peningkatan ketersediaan perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan
			Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan
	Meningkatnya kualitas layanan perhubungan	Optimalisasi pengelolaan angkutan umum dan penertiban lalu lintas	Optimalisasi layanan angkutan sekolah
			Pengembangan layanan uji KIR berbasis IT
			Optimalisasi pengelolaan parkir
			Optimalisasi manajemen rekayasa lalu lintas
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah berbasis Kinerja
			Meningkatkan kenyamanan kantor agar tercipta lingkungan kerja yang kondusif

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian kinerja merupakan proses perjanjian rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam perjanjian kinerja memuat sasaran strategis dengan merinci indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam tahun 2022 serta menyebutkan program dan uraian kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis. Dalam dokumen Perjanjian Kinerja, Dinas Perhubungan Kota Blitar memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen Perjanjian Kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, serta formulasi perhitungan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2022 dapat dilihat pada table II.2 berikut dan Lampiran 2 LKjIP Tahun 2022:

Tabel II.2
Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBAER DATA
1.	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	Rata-rata persentase perlengkapan jalan dalam kondisi baik, prasarana dan fasilitas terminal dalam kondisi baik, fasilitas keselamatan jalan dalam kondisi baik dan sarana prasarana uji kendaraan dalam kondisi baik	Bidang Keselamatan Jalan, Bidang Angkutan Jalan dan Terminal, Bidang Lalu Lintas dan UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan	Data sarpras perhubungan dan fasilitas keselamatan
2.	Meningkatnya kualitas layanan perhubungan Kargo/ Barang	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perhubungan	Rata-rata capaian IKM layanan angkutan sekolah gratis, ikm terhadap layanan uji kendaraan bermotor dan IKM terhadap pelayanan parkir tepi jalan umum	Bidang Angkutan Jalan dan Terminal, UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan dan UPT Pengelolaan Parkir	Hasil penyusunan IKM layanan perhubungan
3.	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada tahun N	Sekretariat	Hasil Penilaian SAKIP PD oleh Tim SAKIP Kota Blitar

Perjanjian Kinerja pada Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2022 ada 3 tingkatan yaitu 1) Perjanjian kinerja antara Kepala Dinas Perhubungan dengan Walikota Blitar 2). Perjanjian kinerja antara Eselon III dengan dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Blitar, 3). Perjanjian kinerja antara Eselon IV dengan Eselon III dan 4). Perjanjian Kinerja antara Eselon IV dengan Pejabat Fungsional. Untuk Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Perhubungan dengan Walikota yang selanjutnya disebut sebagai perjanjian kinerja organisasi dapat ditunjukkan sebagai berikut.

SASARAN 1: Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	%	93

SASARAN 2: Meningkatnya kualitas layanan perhubungan Kargo/ Barang	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perhubungan	Nilai	81,10 BAIK

SASARAN 3: Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	84 A

Adapun Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2022 secara terperinci sebagaimana dalam Lampiran 3 LKj IP 2022.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja / Sasaran

Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah.

Adapun Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara:

- Membandingkan realisasi Kinerja dengan sasaran (target) Kinerja yang dicantumkan pada Dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN / APBD.
- Membandingkan realisasi Kinerja Sasaran sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran (target) Kinerja 5 tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis OPD.

Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

- ❖ Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

Prosentase Tingkat Capaian	=	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$
-----------------------------------	----------	--

- ❖ Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut :

Prosentase Tingkat Capaian	=	$\frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$
-----------------------------------	----------	--

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Skala Pengukuran Kinerja Sasaran

No.	% Nilai Capaian Kinerja		Predikat
	%	Keterangan	
1	85% s.d. 100%	Delapan Puluh Lima persen sampai dengan Seratus persen	Sangat Berhasil
2	70% s.d < 85%	Tujuh Puluh persen sampai dengan kurang dari Delapan Puluh Lima persen	Berhasil
3	55% s.d < 70%	Liam Puluh Lima persen sampai dengan kurang dari Tujuh Puluh persen	Cukup Berhasil
4	< 55%	Dibawah Lima Puluh Lima persen	Tidak Berhasil

1. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2022

Analisis atas capaian kinerja pada tahun 2022 merupakan analisis terhadap Komitmen Dinas Perhubungan guna mencapai target kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Indikator Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Blitar sebagaimana ditunjukkan dalam table III.1 berikut.

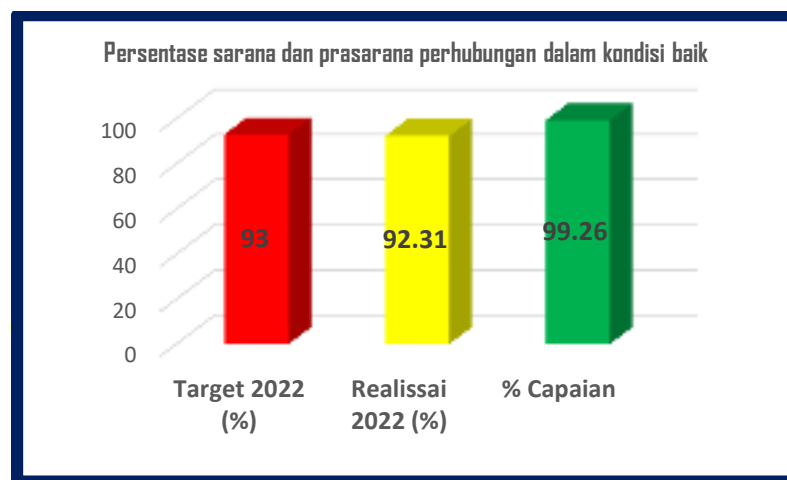
Tabel III.1
Pencapaian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian
Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	93 %	92,31 %	99,26
Meningkatnya kualitas layanan perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan perhubungan	81,10 Baik	81,86 Baik	100,94
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84 A	85,40 A	101,67

Penjabaran analisis pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Blitar tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. **Sasaran 1** : Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan, dengan indikator kinerja *Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik* memperoleh capaian sebesar **99,26%**

Diagram capaian Sasran 1 :



1) Keterangan :

- ❖ Jumlah Perlengkapan jalan dalam kondisi baik sejumlah 132.349 dari total keseluruhan 133.221. Jumlah prasarana dan fasilitas terminal dalam kondisi baik sejumlah 86 dari total keseluruhan 94. Jumlah fasilitas keselamatan jalan dalam kondisi baik sejumlah 3.726 dari total keseluruhan 4.259. Sedangkan jumlah sarana prasarana uji kendaraan dalam kondisi baik sejumlah 20 dari total keseluruhan 22.
- ❖ Formulasi perhitungan indikator sasaran *Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik* adalah rata-rata persentase perlengkapan jalan dalam kondisi baik, prasarana dan fasilitas terminal dalam kondisi baik, fasilitas keselamatan jalan dalam kondisi baik dan sarana prasarana uji kendaraan dalam kondisi baik. Persentase perlengkapan jalan

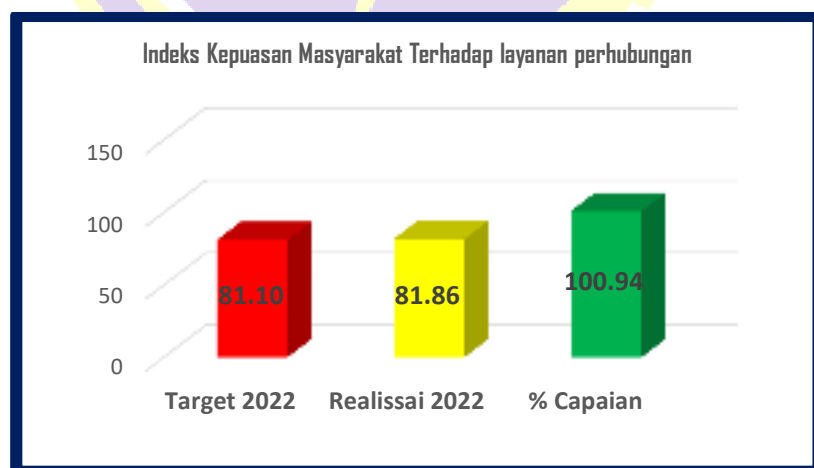
dalam kondisi baik sebesar 99,35%, persentase prasarana dan fasilitas terminal dalam kondisi baik sebesar 91,49%, persentase fasilitas keselamatan jalan dalam kondisi baik sebesar 87,49% dan persentase sarana prasarana uji kendaraan dalam kondisi baik sebesar 90,91%.

- ❖ Pada indikator kinerja *Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik* terealisasi 92,31% dari target 93% dengan persentase capaian 99,26%. Sehingga indikator ini dapat dikategorikan

Sangat Berhasil.

- 2) Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran ini yaitu kurangnya ketersediaan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana perhubungan karena keterbatasan anggaran.
 - 3) Solusi yang ditempuh yaitu penganggaran kembali pengadaan paku jalan pada tahun 2023.
- b. Sasaran 2 :** Meningkatnya kualitas layanan perhubungan dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan perhubungan, memperoleh capaian sebesar **100,94%**

Diagram capaian Sasran 2 :



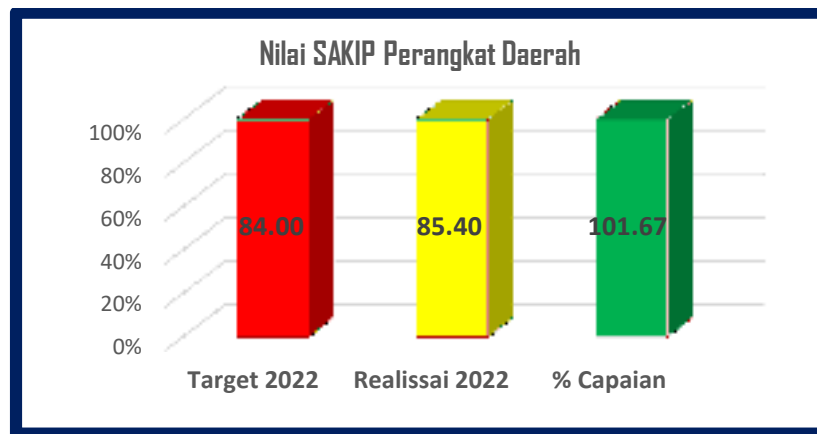
1) Keterangan :

- ❖ Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat layanan angkutan sekolah gratis sebesar 82,67. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat layanan uji kendaraan bermotor sebesar 81,28 sedangkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan parkir tepi jalan umum sebesar 81,64.
- ❖ Formulasi perhitungan untuk indikator sasaran *Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan perhubungan* adalah rata-rata capaian IKM layanan angkutan sekolah gratis, IKM layanan uji kendaraan bermotor dan IKM pelayanan parkir tepi jalan umum
- ❖ Pada indikator sasaran *Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan perhubungan* tercapai 81,86% dari target 81,10% dengan persentase capaian sebesar 100,94%. Sehingga indikator ini dapat dikategorikan **Sangat Berhasil**.

- 2) Berdasarkan capaian indikator yang diperoleh, tidak ada kendala mendasar yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini.
- 3) Meskipun tidak ada kendala dan solusi yang harus dilakukan, namun peningkatan kualitas layanan perhubungan akan selalu kita tingkatkan dalam rangka mewujudkan pelayanan prima di Kota Blitar khususnya layanan perhubungan.

c. **Sasaran 3** : Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja *Nilai SAKIP Perangkat Daerah* memperoleh capaian sebesar **101,67%** .

Diagram capaian Sasran 3:



1) Keterangan :

Pada indikator sasaran Nilai SAKIP Perangkat Daerah tercapai 85,40 dari target 84 dengan persentase capaian sebesar 101,67%. Sehingga indikator ini dapat dikategorikan **Sangat Berhasil**.

- 2) Berdasarkan capaian indikator yang diperoleh, tidak ada kendala mendasar yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini.
- 3) Meskipun tidak ada kendala dan solusi yang harus dilakukan, namun Penyelenggaraan administrasi Perangkat Daerah yang baik dalam rangka Implementasi SAKIP akan senantiasa ditingkatkan.

Keberhasilan/kegagalan pencapaian target pada Perjanjian Kinerja tahun 2022 ditunjukkan dalam tabel III.2 berikut :

Tabel III.2
Pencapaian Target pada Perjanjian Kinerja
Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2022

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	99,26 %	V			
Meningkatnya kualitas layanan perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan perhubungan	100,94 %	V			
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	101,67 %	V			
Rata-rata keberhasilan capaian Sasaran Strategis		100,62	SANGAT BERHASIL			

Berdasarkan akumulasi capaian indikator kinerja sasaran tersebut, menunjukkan bahwa kinerja Dinas Perhubungan Kota Blitar pada tahun 2022 termasuk kategori Berhasil, dengan nilai capaian kinerja **100,62%** dan dikategorikan **Sangat Berhasil**.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 – 2022

Perbandingan data kinerja antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun 2022 untuk setiap indikatornya diuraikan pada tabel III.3 berikut:

Tabel III.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas
Perhubungan Kota Blitar Tahun 2021– 2022

No	Sasaran Strategis/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Realisasi		Capaian Kinerja	
			2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perhubungan	Persentase ruas jalan yang dilengkapi kelengkapan jalan berkeselamatan	95 %	-	87,82%	-	92,45 %	-
2	Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi sekolah dan terminal Kargo/Barang	Load Factor penumpang angkutan sekolah gratis	75 %	-	15,29%	-	20,38 %	-
		Persentase Pemanfaatan terminal Kargo/Barang	40 %	-	44,42%	-	111,04 %	-
3	Meningkatnya penyelenggaraan lalu lintas yang tertib, aman dan lancar	WTN	WTN	-	NA	-	NA	-
4	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	-	93 %	-	92,31 %	-	99,26 %
5	Meningkatnya kualitas layanan perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan perhubungan	-	81,10	-	81,86	-	100,94 %
6	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	84	-	85,40	-	101,67 %

Dari tabel perbandingan diatas dapat disimpulkan bahwa baik target, realisasi maupun persentase tingkat capaiannya antara tahun 2021 dan tahun 2022 tidak dapat dibandingkan. Hal ini disebabkan karena perbedaan indikator kinerja sasaran yang diukur. Dimana untuk pengukuran indikator sasaran tahun 2021 mengacu pada Renstra 2016-2021, sedangkan pengukuran indikator sasaran tahun 2022 mengacu pada Renstra 2021-2026. Sesuai dengan Restra 2021-2026, pengukuran kinerja tahun 2022 merupakan tahun pertama, sehingga belum muncul data pembanding dengan tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2022 sampai dengan periode Renstra Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2021-2026 ditunjukkan dalam tabel III.4 berikut :

Tabel III.4
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra 2021-2026
Dinas Perhubungan Kota Blitar

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi s/d 2022	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	97 %	92,31%	95,16 %
2	Meningkatnya kualitas layanan perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan perhubungan	81,18 Baik	81,86 Baik	100,84 %
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,30 A	85,40 A	100,18 %

Berdasarkan tabel diatas ada dua indikator kinerja yang capaian realisasi tahun 2022 sudah melebihi target akhir Renstra, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perhubungan dan Nilai SAKIP Perangkat Daerah. Untuk itu akan dilakukan perubahan strategi pencapaian target yang dimana target 2025 akan dimajukan menjadi target 2023 dan begitu juga untuk target 2026 akan dimajukan menjadi target 2024.

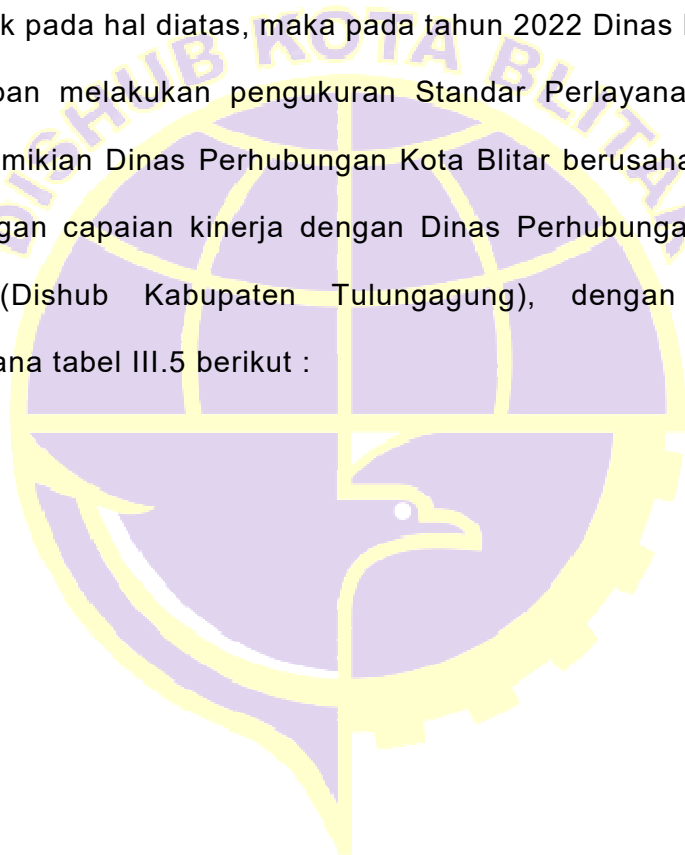
4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Nasional (Target SPM)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal. Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Urusan

Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman
5. Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan
6. Sosial

Merujuk pada hal diatas, maka pada tahun 2022 Dinas Perhubungan tidak berkewajiban melakukan pengukuran Standar Pelayanan Minimal (SPM). Namun demikian Dinas Perhubungan Kota Blitar berusaha untuk melakukan perbandingan capaian kinerja dengan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota Lainnya (Dishub Kabupaten Tulungagung), dengan perolehan data sebagaimana tabel III.5 berikut :



Tabel III.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Perhubungan Kota Blitar dengan Dinas Perhubungan Kab/Kota Lain
Tahun 2022

Kinerja	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		% Capaian	
		Dishub Kab. Tulungagung	Dishub Kota Blitar	Dishub Kab. Tulungagung	Dishub Kota Blitar	Dishub Kab. Tulungagung	Dishub Kota Blitar
Meningkatnya Kinerja Transportasi	- Persentase Peningkatan Fasilitas Perlengkapan Jalan dan prasarana perhubungan layak fungsi (Kabupaten Tulungagung) - Persentase prasarana dan fasilitas perhubungan dalam kondisi baik (Kota Blitar)	80 %	93 %	80,78%	92,31 %	100,98 %	99,26 %

B. Akuntabilitas Keuangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pada tahun 2022 Dinas Perhubungan Kota Blitar didukung dengan dana yang cukup memadai. Pada tabel III.6 berikut akan kami sajikan pagu anggaran, realisasi dan sisa pagu anggaran beserta persentase realisasinya.

Tabel III.6
Persentase Realisasi Anggaran Tahun 2022
Dinas Perhubungan Kota Blitar

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.939.328.435,00	7.598.164.356,71	95,70
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.294.200,00	49.168.150,00	97,76
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.977.200,00	7.763.200,00	97,32
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	42.317.000,00	41.404.950,00	97,84
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.050.451.085,00	4.949.422.162,00	98,00
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.046.675.085,00	4.946.521.362,00	98,02
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran	3.776.000,00	2.900.800,00	76,82
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	324.973.700,00	319.449.800,00	98,30
Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	171.285.600,00	169.010.000,00	98,67
Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang – undangan	153.688.100,00	150.439.800,00	97,89
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.424.850.100,00	1.252.450.241,64	87,90

1	2	3	4
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	5.996.900,00	5.990.000,00	99,88
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	315.834.500,00	286.908.200,00	90,84
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan rumah Tangga	23.315.800,00	23.143.300,00	99,26
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	783.548.700,00	666.424.407,64	85,05
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.130.300,00	15.018.000,00	99,26
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	7.440.000,00	7.440.000,00	100,00
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	273.583.900,00	247.526.334,00	90,48
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	290.406.000,00	259.996.854,00	89,53
Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	450.000,00	350.000,00	77,78
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	289.956.000,00	259.646.854,00	89,55
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	798.353.350,00	767.677.149,07	96,16
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	405.269.600,00	383.538.344,00	94,64
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.912.900,00	23.589.800,00	98,65
Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	156.200.000,00	154.500.082,78	98,91
Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	212.970.850,00	206.048.922,29	96,75
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	13.158.979.600,00	12.835.293.388,67	97,54
Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	13.158.979.600,00	12.835.293.388,67	97,54

1	2	3	4
Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.392.900.000,00	2.354.231.229,32	98,38
Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	613.815.000,00	611.337.428,40	99,60
Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	9.148.570.200,00	8.877.745.433,00	97,04
Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1.003.694.400,00	991.979.297,95	98,83
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	411.352.300,00	398.497.741,49	96,88
Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	396.442.200,00	385.841.641,49	97,33
Sub Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	133.892.800,00	126.776.700,00	94,69
Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	262.549.400,00	259.064.941,49	98,67
Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	14.910.100,00	12.656.100,00	84,88
Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	14.910.100,00	12.656.100,00	84,88
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	3.846.986.012,00	3.444.313.750,32	89,53
Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3.846.986.012,00	3.444.313.750,32	89,53
Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	484.056.300,00	477.934.449,32	98,74
Sub Kegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1.291.034.112,00	998.158.362,00	77,31

1	2	3	4
Sub Kegiatan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	198.190.800,00	195.468.100,00	98,63
Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1.873.704.800,00	1.772.752.839,00	94,61
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1.837.523.800,00	1.675.586.463,00	91,19
Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	1.837.523.800,00	1.675.586.463,00	91,19
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1.837.523.800,00	1.675.586.463,00	91,19
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	414.727.317,00	408.689.765,45	98,54
Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	414.727.317,00	408.689.765,45	98,54
Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	111.363.800,00	108.640.800,00	97,55
Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00
Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	228.363.517,00	225.048.965,45	98,55
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1.828.769.600,00	1.813.802.833,29	99,18
Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.828.769.600,00	1.813.802.833,29	99,18
Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	824.027.300,00	821.831.690,75	99,73

1	2	3	4
Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	1.004.742.300,00	991.971.142,54	98,73
TOTAL	29.437.667.064,00	28.174.348.298,93	95,71

1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Untuk mengetahui persentase anggaran pada Sasaran Strategis dibandingkan dengan keseluruhan anggaran Belanja Daerah pada Dinas Perhubungan Kota Blitar tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel III.7
Alokasi per Sasaran Pembangunan
Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	% Anggaran
1	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	17.417.317.912,00	59,17
2	Meningkatnya kualitas layanan perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan perhubungan	4.081.020.717,00	13,86
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	7.939.328.435,00	26,97
Total Anggaran			29.437.667.064,00	100

2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun

2022 ditunjukkan dalam tabel III.8 berikut :

Tabel III.8
Pencapaian Kinerja dan Anggaran
Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2022

Sasaran Strategis / Kinerja Utama / Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	93	92,31	99,26	17.417.317.912,00	16.678.104.880,48	95,76
<i>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</i>	<i>Persentase kelengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik</i>	<i>99,45</i>	<i>98,98 37,8</i>	<i>99,53</i>	<i>13.158.979.600,00</i>	<i>12.835.293.388,67</i>	<i>97,54</i>
Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten /Kota	Jumlah jenis perlengkapan jalan yang tersedia	5	5	100	13.158.979.600,00	12.835.293.388,67	97,54
<i>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</i>	<i>Persentase prasarna dan fasilitas terminal dalam kondisi baik</i>	<i>85</i>	<i>91,49</i>	<i>107,64</i>	<i>411.352.300,00</i>	<i>398.497.741,49</i>	<i>96,88</i>
Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah jenis saran dan prasarana terminal yang terkelola	11	11	100	396.442.200,00	385.841.641,49	97,33
Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rencana umum jaringan trayek yang ditetapkan	9	9	100	14.910.100,00	12.656.100,00	84,88
<i>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</i>	<i>Persentase penurunan angka pelanggaran marka dan rambu lalu lintas</i>	<i>0,33</i>	<i>0,20</i>	<i>139,39</i>	<i>3.846.986.012,00</i>	<i>3.444.313.750,32</i>	<i>89,53</i>
Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kajian manajemen rekayasa lalu lintas yang ditindaklanjuti	1	1	100	3.846.986.012,00	3.444.313.750,32	89,53
Rata rata capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis				99,26	17.417.317.912,00	16.678.104.880,48	95,76

1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Kualitas layanan Perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan perhubungan	81,10	81,86	100,94	4.081.020.717,00	3.898.079.061,74	95,52
<i>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</i>	<i>IKM terhadap pelayanan parkir tepi jalan umum</i>	<i>81,60</i>	<i>81,64</i>	<i>100,05</i>	<i>1.837.523.800,00</i>	<i>1.675.586.463,00</i>	<i>91,19</i>
Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase jukir yang mentaati aturan/SOP juru parkir	76	76,50	100,66	1.837.523.800,00	1.675.586.463,00	91,19
<i>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</i>	<i>IKM terhadap layanan uji kendaraan bermotor</i>	<i>81</i>	<i>81,28</i>	<i>100,35</i>	<i>414.727.317,00</i>	<i>408.689.765,45</i>	<i>98,54</i>
Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan yang lulus uji kendaraan	94,50	91,84	97,19	414.727.317,00	408.689.765,45	98,54
<i>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</i>	<i>IKM layanan Angkutan Sekolah Gratis</i>	<i>82,60</i>	<i>82,67</i>	<i>100,08</i>	<i>1.858.769.600,00</i>	<i>1.813.802.833,29</i>	<i>99,18</i>
Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase angkutan umum layak yang tersedia	82	100	121,95	1.858.769.600,00	1.813.802.833,29	99,18
Rata rata Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis				100,94	4.081.020.717,00	3.898.079.061,74	95,52
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84	85,40	101,67	7.939.328.435,00	7.598.164.356,71	95,70
<i>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</i>	<i>80,95</i>	<i>81,31</i>	<i>100,44</i>	<i>7.939.328.435,00</i>	<i>7.598.164.356,71</i>	<i>95,70</i>
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100	100	100	50.294.200,00	49.168.150,00	97,76
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100	100	100	5.050.451.085,00	4.949.422.162,00	98,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100	100	100	324.973.700,00	319.449.800,00	98,30
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100	100	100	1.424.850.100,00	1.252.450.241,64	87,90

1	2	3	4	5	6	7	8
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100	100	100	290.406.000,00	259.996.854,00	89,53
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100	100	100	798.353.350,00	767.677.149,07	96,16
Rata rata Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis				101,67	7.939.328.435,00	7.598.164.356,71	95,70

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2022 adalah:

- ❖ Sasaran 1: “Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan” persentase capaian kinerjanya mencapai 99,26% dengan persentase capaian anggaran sebesar 95,76%;
- ❖ Sasaran 2: “Meningkatnya Kualitas layanan Perhubungan” persentase capaian kinerjanya mencapai 100,94% dengan persentase capaian anggaran sebesar 95,52%;
- ❖ Sasaran 3: “Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah” persentase capaian kinerjanya mencapai 101,67% dengan persentase capaian anggaran sebesar 95,70%.

3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk efisiensi penggunaan anggaran atas kinerja Dinas Perhubungan Kota Blitar tahun 2022 ditunjukkan pada tabel III.9 berikut :

Tabel III.9
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2022
Dinas Perhubungan Kota Blitar

Sasaran Strategis / Kinerja Utama / Program	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5
Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	99,26	95,76	1,04
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase kelengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik	99,53	97,54	1,02
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase prasarna dan fasilitas terminal dalam kondisi baik	107,64	96,88	1,11
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase penurunan angka pelanggaran marka dan rambu lalu lintas	139,39	89,53	1,56
Rata rata Capaian Kinerja dan Anggaran		99,26	95,76	1,04
Meningkatnya Kualitas layanan Perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan perhubungan	100,94	95,52	1,06
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	IKM terhadap pelayanan parkir tepi jalan umum	100,05	91,19	1,11
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	IKM terhadap layanan uji kendaraan bermotor	100,35	98,54	1,02
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	IKM layanan Angkutan Sekolah Gratis	100,08	99,18	1,01
Rata rata Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis		100,94	95,52	1,06
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	101,67	95,70	1,06
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100,44	95,70	1,05
Rata rata Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis		101,67	95,70	1,06

Dari tabel diatas, Untuk efisiensi penggunaan sumber daya dapat disimpulkan bahwa :

- ❖ Sasaran 1: Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan, tingkat efisiensinya sebesar 1,04. Hal ini dapat dikatakan efisiensi karena untuk mencapai kinerja sebesar 99,26% hanya membutuhkan anggaran sebesar 95,76%;
- ❖ Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas layanan Perhubungan, tingkat efisiensinya sebesar 1,06. Hal ini juga dikatakan efisiensi karena untuk mencapai kinerja sebesar 100,94% membutuhkan anggaran sebesar 95,52%;
- ❖ Sasaran 3: Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah, tingkat efisiensinya sebesar 1,06. Hal ini dikatakan efisien karena untuk mencapai kinerja 101,67% membutuhkan anggaran sebesar 95,70%.

C. Prestasi / Penghargaan

Pada Tahun 2022 Dinas Perhubungan mendapatkan satu penghargaan di Tingkat Nasional yaitu **Peringkat Pertama Penilaian Rail Safety Award Tingkat Nasional** yang diserahkan di Padang tanggal 16 Nopember 2022 oleh Direktur Keselamatan Perkeretaapian Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia kepada Walikota Blitar yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Blitar. Penghargaan Rail Safety tersebut, merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam membangun sistem keselamatan perkeretaapian. Terpilihnya Kota Blitar sebagai Peringkat Pertama ini karena memenuhi 3 (tiga) kriteria yakni sisi organisasi, sisi kemajuan dan pemanfaatan teknologi serta sisi standar operasional dan prosedur. Pemerintah Kota Blitar dalam hal ini Dinas Perhubungan, telah membangun 5 (lima)

pos penjagaan dan palang pintu perlintasan di 5 (lima) titik yang berbeda. Hal itu merupakan wujud kepedulian Pemerintah Kota Blitar untuk menciptakan sistem keamanan bagi pengguna jalan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Dinas Perhubungan kota Blitar tahun 2022 merupakan media pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Perhubungan Kota Blitar. Dari hasil capaian Indikator Kinerja sasaran, dapat disimpulkan bahwa:

Sasaran 1, Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan dengan indikator sasaran *Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik*. Realisasi indikator sasaran ini pada tahun 2022 mencapai 92,31% dari target 93% dengan capain **99,26%**, sehingga pada sasaran ini dikategorikan **Sangat Berhasil**.

Sasaran 2, Meningkatnya Kualitas layanan Perhubungan dengan indikator sasaran *Indeks Kepuasan Masyarakat layanan perhubungan*. Realisasi indikator sasaran ini pada tahun 2022 mencapai 81,86 dari target 81,10 dengan tingkat capain sebesar **100,94%**. Sehingga pada sasaran ini dikategorikan **Sangat Berhasil**.

Sasaran 3, Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah dengan indikator sasaran *Nilai SAKIP Perangkat Daerah*. Realisasi indikator sasaran ini pada tahun 2022 mencapaia 85,40 dari target 84 dengan tingkat capaian **101,67%**. Sehingga pada sasaran ini dikategorikan **Sangat Berhasil**.

Anggaran Belanja yang teralokasi untuk Dinas Perhubungan Kota Blitar tahun 2022 sebesar **Rp 29.437.667.064,00** (*Dua Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Puluh*

Empat Rupiah) dan terserap **Rp. 28.174.348.298,93** (*Dua Puluh Delapan Milyar Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah Sembilan Puluh Tiga Sen*) atau sebesar **95,71%** dari jumlah pagu.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Blitar tahun 2022 dapat dikatakan Sangat Berhasil, namun demikian masih tetep dijumpai beberapa kendala/ hambatan dalam pelaksanaannya baik secara langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap kinerja Perangkat Daerah.

B. Langkah Perbaikan

Langkah Perbaikan dalam menyikapi permasalahan yang dihadapi, ada beberapa langkah strategi yang harus dilakukan, diantaranya:

1. Peningkatan ketersediaan dan kualitas Prasarana dan fasilitas perhubungan yang lebih memadai sesuai dengan perkembangan transportasi;
2. Peningkatan layanan uji kendaraan yang berbasis IT dan penerapan beberapa inovasi sehingga memudahkan proses layanan uji berkala;
3. Pengelolaan terminal tipe C secara optimal;
4. Peningkatan kapasitas kinerja juru parkir tepi jalan umum;
5. Sosialisasi edukasi terhadap pengguna jalan di berbagai jenjang terkait keselamatan dan tertib berlalu lintas.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam LKjIP Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2022 semoga dapat memberikan kejelasan terhadap gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kota

Blitar, sehingga secara bersama-sama kita bisa membangun Kota Blitar dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah menuju peningkatan pelayanan kepada masyarakat Kota Blitar.

Blitar, 25 Februari 2023

**Kepala Dinas Perhubungan
Kota Blitar**



JUARI, S.H., M.Si.

Pemimpin Utama Muda

NIP. 19661204 198603 1006



Lampiran-lampiran

- A. Matrik Rencana Strategi OPD Tahun 2021-2026
- B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022
- C. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- D. Pengukuran Kinerja Tahun 2022



**MATRIK RENCANA STRATEGIS
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BLITAR
TAHUN 2021-2026**

VISI : KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur, dan Bermartabat

MISI 4 : Mewujudkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan

TUJUAN					SASARAN					CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET.
Uraian	Indikator	Formulasi Perhitungan	Kondisi awal 2022	Target 2022	Uraian	Indikator	Formulasi Perhitungan	Kondisi awal 2022	Target 2022	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatnya kualitas perhubungan	Level Of Service (LOS)	v/c ratio kinerja ruas jalan	c	c	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	Rata-rata persentase perlengkapan jalan dalam kondisi baik, prasarana dan fasilitas terminal dalam kondisi baik, fasilitas keselamatan jalan dalam kondisi baik dan sarana prasarana uji kendaraan dalam kondisi baik	93%	93%	Peningkatan ketersediaan dan kualitas prasarana perhubungan	Optimalisasi pemeliharaan dan rehabilitasi terminal	
										Peningkatan ketersediaan perlengkapan dan keselamatan jalan yang memadai	Peningkatan ketersediaan perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan	
											Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan	
Meningkatnya Kualitas layanan Perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat layanan Perhubungan				Meningkatnya Kualitas layanan Perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat layanan Perhubungan	Rata-rata capaian IKM layanan angkutan sekolah gratis, ikm terhadap layanan uji kendaraan bermotor dan IKM terhadap pelayanan parkir tepi jalan umum	Baik 81,07	Baik 81.10	Optimalisasi pengelolaan angkutan umum dan penertiban lalu lintas	Optimalisasi layanan angkutan sekolah	
											Pengembangan layanan uji KIR berbasis IT	
											Optimalisasi pengelolaan parkir	
Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD				Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada tahun N	A	A 84	Optimalisasi pengelolaan dan pelayanan Perangkat Daerah	Optimalisasi manajemen rekayasa lalu lintas	
											Penertiban pelanggaran lalu lintas	
											Optimalisasi layanan administrasi kesekretariatan	



**RENCANA KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BLITAR**

No	SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program	Target	Uraian	Indikator Kegiatan	Target	Uraian	Indikator Sub Kegiatan	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	93%	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase penurunan pelanggaran marka dan rambu lalu lintas	0,33	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah kajian manajemen rekayasa lalu lintas yang ditindaklanjuti	1 kajian	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah kajian manajemen rekayasa lalu lintas yang tersusun	4 kajian	484.056.300
										Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah jenis fasilitas keselamatan dan alat bantu MRL yang terpenuhi	2 jenis	1.291.034.112
											Jumlah palang pintu Kereta Api yang terpasang/ terpelihara	5 lokasi	
										Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah peserta pembinaan kelalulintasan	75 peserta	198.190.800,00
											Jumlah car free day yang terselenggara	2 kali	
										Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan pengendalian dan pengamanan lalu lintas yang terlaksana	12 monitoring	1.873.704.800,00
											Jumlah operasi gabungan yang terlaksana	48 opgab	
					Persentase kelengkapan jalan dan fasilitas keselamatan dalam kondisi baik	99,45%	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah jenis perlengkapan jalan yang tersedia	5 jenis	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah PJU yang tersedia	139 unit	2.392.900.000,00
										Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah rambu yang tersedia	25 rambu	613.815.000,00
											Jumlah APILL yang tersedia (warning light, traffic light)	5 lokasi	
										Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah jenis komponen listrik yang tersedia	25 jenis	9.148.570.200,00
											Jumlah PJU yang terbayarkan	5864 titik	
										Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Panjang marka yang terpelihara	8600 meter	1.003.694.400,00
											Jumlah rambu yang terpelihara	40 buah	
											Jumlah APILL yang terpelihara	9 lokasi	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Persentase prasarana dan fasilitas terminal dalam kondisi baik	85,00%	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah jenis sarana dan prasarana terminal yang dikelola	11 jenis	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah perlengkapan terminal yang tersedia	1 unit	133.892.800,00
										Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah jenis fasilitas terminal yang terpelihara dengan baik	3 jenis	262.549.400,00
							Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah rencana umum jaringan trayek yang ditetapkan	9 trayek	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan rencana umum jaringan trayek	100 orang	14.910.100,00
2	Meningkatnya Kualitas layanan Perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat layanan Perhubungan	Baik (81.10)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	IKM layanan Angkutan Sekolah Gratis	82,6 Baik	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase angkutan umum layak yang tersedia	82,00%	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah armada angkutan sekolah gratis dalam kondisi baik	9 armada	824.027.300,00
											Jumlah halte yang terpelihara	12 unit	
										Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah awak angkutan yang terfasilitasi	845 orang	1.004.742.300,00
					IKM terhadap layanan uji kendaraan bermotor	81,00 Baik	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan yang lulus uji kendaraan	94,50%	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan uji yang terfasilitasi	5000 kendaraan	111.363.800,00
										Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Tanda Bukti lulus uji dan kartu pintar yang tersedia	3000 set	75.000.000,00
										Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah alat uji kendaraan bermotor yang terkalibrasi dan terpelihara	11 alat	228.363.517,00
					IKM terhadap pelayanan parkir tepi jalan umum	81,60 Baik	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase jukir yang mentaati aturan/SOP juru parkir	76,00%	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah juru parkir yang terfasilitasi dan terbina	230 orang	1.837.523.800,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	A 84	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	baik (80.95)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100,00%	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	14 jenis	7.977.200,00
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen pelaporan perangkat daerah yang tersusun	7 jenis	42.317.000,00
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100,00%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan	50 orang	5.046.675.085,00
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran	Jumlah jenis Laporan Keuangan yang tersusun (Bulanan/Semesteran)	2 jenis	3.776.000,00
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100,00%	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah ASN yang terfasilitasi pakaian dinas dan kelengkapannya	50 ASN	171.285.600,00
										Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah even daerah dan hari besar nasional yang diikuti	5 event	153.688.100,00
											Jumlah Jenis Publikasi Program/ Kegiatan Perangkat Daerah	2 jenis	
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100,00%	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	9 jenis	5.996.900,00
										Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	13 unit	315.834.500,00
											Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	13 unit	
										Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	26 jenis	23.315.800,00
										Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	28	783.548.700,00
											Jumlah dos / kotak makanan dan minuman yang tersedia	3.000	
											Jumlah THL yang terbayarkan gajinya	20 orang	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan yang tersedia	6 jenis	15.130.300,00
											Jumlah lembar penggandaan	1950 lembar	
										Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	36 eksemplar	7.440.000,00
										Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	180	273.583.900,00
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100,00%	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah jenis jasa surat menyurat yang tersedia	2 jenis	450.000,00
										Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis rekening yang terbayarkan (termasuk listrik, air, telepon, internet)	4 jenis	289.956.000,00
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100,00%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	98 unit	405.269.600,00
										Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara	63 unit	
										Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	73 unit	23.912.900,00
										Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	3 gedung	156.200.000,00
										Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	3 jenis	212.970.850,00



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BLITAR**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JUARI, S.H., M.Si.

Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Kota Blitar

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Drs. SANTOSO, M.Pd

Jabatan : WALIKOTA BLITAR

Selaku atasan langsung pihak Pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

WALIKOTA BLITAR

Drs. SANTOSO, M.Pd

Blitar, 18 Oktober 2022
Kepala Dinas Perhubungan Kota
Blitar

JUARI, S.H., M.Si.
NIP. 196512041986031006

PENGUKURAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Perangkar Daerah : Dinas Perhubungan Kota Blitar
Tahun : 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target	Realisasi	%	Ket.	Program / Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi	%	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	Rata-rata persentase perlengkapan jalan dalam kondisi baik, prasarana dan fasilitas terminal dalam kondisi baik, fasilitas keselamatan jalan dalam kondisi baik dan sarana prasarana uji kendaraan dalam kondisi baik	93%	92,31%	99,26		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	17.417.317.912,00	16.678.104.880,48	95,76	
2	Meningkatnya Kualitas layanan Perhubungan	Indeks Kepuasan Masyarakat layanan Perhubungan	Rata-rata capaian IKM layanan angkutan sekolah gratis, ikm terhadap layanan uji kendaraan bermotor dan IKM terhadap pelayanan parkir tepi jalan umum	81,10 Baik	81,86 Baik	100,94		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	4.081.020.717,00	3.898.079.061,74	95,52	
3	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada tahun N	84 A	85,40 A	101,67		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.939.328.435,00	7.598.164.356,71	95,70	

Blitar, 25 Februari 2023

Kepala Dinas Perhubungan
Kota Blitar


WARI, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19651204 198603 1 006